



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4126-4135

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pentingnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Erni Lestari Harianto¹, Muhammad Afdal², Fitriani Syukri³

^{1,2,3}Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
ernilestariharianto15@gmail.com¹, abeafdal26@gmail.com², fitriyanisyukri19@gmail.com³

Abstrak

Pembangunan ekonomi merupakan instrumen strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, serta transformasi struktural dalam sistem sosial dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus menelaah kesalahan ejaan dalam pemberitaan media daring berdasarkan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi terhadap berita daring yang relevan, dipilih secara purposif, dan dianalisis dalam dua tahap: analisis isi untuk menilai bentuk, strategi, dan peran perencanaan pembangunan ekonomi, serta analisis kebahasaan untuk mengidentifikasi kesalahan ejaan, penggunaan huruf kapital, kata depan, tanda baca, dan unsur serapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi yang terarah, berbasis data, dan partisipatif memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMKM, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Selain itu, analisis kebahasaan mengungkapkan kesalahan umum dalam berita daring yang dapat menurunkan keterbacaan, kredibilitas media, dan pemahaman publik. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global, sekaligus menekankan peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat secara substansi dan tepat secara linguistik. Pemberitaan yang baik tidak hanya menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga membentuk persepsi publik, mendidik masyarakat mengenai proses pembangunan, serta meningkatkan kesadaran akan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas informasi publik, dan profesionalitas media daring.

Kata kunci: Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Ekonomi, Media Daring, Ejaan Bahasa Indonesia.

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif teori pembangunan klasik dan modern, pembangunan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai proses peningkatan output nasional, tetapi juga sebagai transformasi struktural yang mencakup perubahan dalam sistem sosial, kelembagaan, dan pola distribusi pendapatan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan pembangunan ekonomi yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Menurut teori pembangunan yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional, disertai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Pandangan ini menegaskan bahwa pembangunan bukanlah sekadar persoalan angka-angka statistik seperti Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga menyangkut kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di daerah tertinggal.

Sejalan dengan itu, Sadono Sukirno menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pandangan ini menekankan pentingnya keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan.

Artinya, peningkatan pendapatan tidak boleh bersifat sementara atau semu, melainkan harus ditopang oleh struktur ekonomi yang kokoh, tata kelola pemerintahan yang baik, serta sistem kelembagaan yang efektif dan transparan. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal, serta memastikan kesinambungan antar generasi.

Dalam konteks perencanaan, teori perencanaan pembangunan wilayah yang dikemukakan oleh Robinson Tarigan menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses penentuan tujuan dan pemilihan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik wilayah. Setiap daerah memiliki sumber daya, kondisi geografis, struktur ekonomi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan tidak dapat disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Perencanaan yang berbasis pada karakteristik wilayah akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Perencanaan pembangunan ekonomi berperan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi, serta meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Tanpa perencanaan yang baik, pembangunan cenderung berjalan tidak terkoordinasi, bersifat jangka pendek, dan berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat memicu permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan struktural, urbanisasi yang tidak terkendali, hingga konflik sosial.

Dalam konteks Indonesia, tantangan pembangunan ekonomi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan struktur ekonomi dari sektor agraris menuju sektor industri dan jasa, serta dinamika global yang terus berkembang. Globalisasi, kemajuan teknologi digital, revolusi industri 4.0, serta ketidakpastian ekonomi dunia menuntut pemerintah untuk memiliki perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Persaingan global menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, serta penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki daya saing internasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Lebih lanjut, pembangunan ekonomi juga berkaitan erat dengan upaya pemerataan pembangunan antarwilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik geografis yang beragam dengan tingkat kemajuan ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah. Ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara pusat dan daerah, menjadi tantangan nyata yang harus diatasi melalui perencanaan yang komprehensif. Kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, pembangunan ekonomi yang terencana dengan baik memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan infrastruktur yang memadai. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga oleh terpenuhinya kebutuhan dasar dan terciptanya lingkungan sosial yang adil dan berkelanjutan. Pembangunan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, serta menurunnya kualitas hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi masa kini, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang partisipatif dan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pembangunan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, sektor swasta berperan sebagai motor penggerak investasi, penciptaan lapangan kerja, serta inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, informasi mengenai pembangunan ekonomi banyak disampaikan kepada masyarakat melalui media massa, khususnya media daring. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih cepat dan instan. Berita pembangunan ekonomi berperan penting dalam membentuk pemahaman dan persepsi publik terhadap kebijakan serta program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam perspektif teori komunikasi massa, media memiliki fungsi informatif, edukatif, sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Melalui proses framing, media dapat memengaruhi cara masyarakat memaknai suatu kebijakan pembangunan, apakah dipandang sebagai langkah strategis yang progresif atau justru sebagai kebijakan yang kontroversial.

Kualitas penyajian berita menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Bahasa yang digunakan dalam berita harus jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan kesalahan penggunaan ejaan dan tata bahasa dalam penulisan berita daring. Kesalahan tersebut dapat mengurangi kualitas informasi, menurunkan kredibilitas media, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pembaca. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) menjadi hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi publik. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan profesionalitas dan tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan penyampaian informasi mengenai pembangunan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Pembangunan yang baik membutuhkan perencanaan yang matang, sedangkan perencanaan yang matang perlu dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat. Transparansi informasi akan memperkuat akuntabilitas pemerintah serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal jalannya pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perencanaan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada contoh berita pembangunan ekonomi yang bersumber dari media daring. Selain itu, artikel ini juga menganalisis kesalahan ejaan yang terdapat dalam berita tersebut berdasarkan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi baik dari sisi pemahaman pembangunan ekonomi maupun dari sisi peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan berita, sehingga pembangunan tidak hanya berjalan secara substantif, tetapi juga dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (content analysis). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara mendalam, khususnya terkait perencanaan pembangunan ekonomi serta kesalahan ejaan dalam penulisan berita daring. Sumber data dalam penelitian ini berupa berita pembangunan ekonomi yang diperoleh dari media daring nasional. Pemilihan berita dilakukan secara purposif, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi isi berita terhadap tema perencanaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berita yang dianalisis merupakan berita yang dipublikasikan dalam kurun waktu tertentu dan memuat informasi mengenai kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat data yang terdapat dalam berita daring yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis data dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah analisis isi, yaitu mengkaji informasi yang terdapat dalam berita untuk mengetahui bentuk dan peran perencanaan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahap kedua adalah analisis kebahasaan, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan ejaan yang terdapat dalam teks berita berdasarkan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), meliputi penggunaan huruf kapital, penulisan kata, tanda baca, serta unsur serapan.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk paparan dan contoh-contoh kesalahan ejaan yang ditemukan, disertai dengan perbaikan yang sesuai dengan kaidah EBI. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya perencanaan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesadaran akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan berita daring.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam Berita Media Daring

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan salah satu isu yang sering diberitakan oleh media daring, terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan berita pembangunan ekonomi yang dianalisis, perencanaan pembangunan digambarkan sebagai upaya pemerintah dalam merancang program-program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi daerah, serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam berita tersebut, perencanaan pembangunan ekonomi ditunjukkan melalui penyusunan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan konsep perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara

efektif dan efisien. Media daring juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan ekonomi yang baik dalam berita tersebut dipandang sebagai landasan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan ekonomi berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif teori pembangunan, perencanaan pembangunan ekonomi merupakan proses sistematis yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Konsep ini sejalan dengan pandangan pembangunan ekonomi yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pemberitaan media daring, perencanaan pembangunan ekonomi sering direpresentasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya secara terarah dan terukur.

Berita media daring umumnya menampilkan perencanaan pembangunan dalam bentuk kebijakan strategis, seperti program peningkatan infrastruktur, penguatan sektor UMKM, hilirisasi industri, serta peningkatan investasi. Narasi yang dibangun dalam berita cenderung menekankan aspek optimisme, pertumbuhan ekonomi, serta target capaian yang ingin diraih pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik terhadap keberhasilan pembangunan.

Selain itu, pemberitaan mengenai perencanaan pembangunan ekonomi juga memperlihatkan adanya pendekatan pembangunan berbasis daerah. Pemerintah daerah digambarkan memiliki peran penting dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal, karakteristik wilayah, serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan partisipatif, di mana masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang terlibat dalam proses perencanaan.

Namun demikian, dari hasil analisis isi dapat dilihat bahwa tidak semua berita menyajikan informasi secara mendalam mengenai mekanisme perencanaan yang dilakukan. Sebagian berita lebih berfokus pada hasil atau target yang ingin dicapai dibandingkan dengan proses perencanaan itu sendiri. Padahal, transparansi proses perencanaan seperti tahapan penyusunan, pelibatan pemangku kepentingan, serta dasar pertimbangan kebijakan merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan publik.

Di sisi lain, media daring memiliki keunggulan dalam kecepatan penyampaian informasi, tetapi sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga kedalaman analisis dan ketelitian bahasa. Oleh karena itu, kualitas pemberitaan mengenai perencanaan pembangunan ekonomi perlu terus ditingkatkan, baik dari sisi substansi informasi maupun dari sisi kebahasaan. Penyajian informasi yang komprehensif dan akurat akan membantu masyarakat memahami arah pembangunan serta dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan ekonomi dalam berita media daring tidak hanya berfungsi sebagai informasi kebijakan, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik mengenai pentingnya perencanaan yang terarah, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Dampak Perencanaan Pembangunan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan isi berita yang dianalisis, perencanaan pembangunan ekonomi memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak utama yang disoroti adalah peningkatan kesempatan kerja melalui pembangunan sektor produktif dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pasar, dan fasilitas publik lainnya, dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar.

Selain itu, perencanaan pembangunan ekonomi juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan UMKM dan sektor ekonomi lokal. Program-program yang direncanakan secara sistematis memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan memperluas akses pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan makro, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat di tingkat mikro.

Kesejahteraan masyarakat dalam berita tersebut juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang lebih baik. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang terarah, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan sosial. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ekonomi menjadi faktor kunci dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perencanaan pembangunan ekonomi yang terarah memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga melalui perbaikan kualitas hidup yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan lingkungan sosial yang kondusif. Oleh karena itu, dampak perencanaan pembangunan ekonomi perlu dianalisis secara komprehensif, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Dalam berita media daring yang dianalisis, dampak perencanaan pembangunan ekonomi sering dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja baru. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor produktif dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya tarik investasi. Dampak lanjutan dari peningkatan investasi adalah bertambahnya peluang kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan yang matang berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Selain dampak langsung terhadap pendapatan, perencanaan pembangunan ekonomi juga memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan akses terhadap layanan dasar. Ketika pembangunan dirancang secara terintegrasi, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur publik. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Lebih lanjut, perencanaan pembangunan ekonomi yang berbasis pemerataan berpotensi mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Dalam beberapa berita, disebutkan bahwa program pembangunan difokuskan pada daerah tertinggal atau kelompok usaha kecil agar manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan atau sektor tertentu saja. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang inklusif dapat memperkuat keadilan sosial dan memperluas distribusi manfaat ekonomi.

Namun demikian, efektivitas dampak tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan kebijakan. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan yang optimal dapat menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, transparansi anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam indikator ekonomi makro, tetapi juga dalam perubahan nyata pada taraf hidup masyarakat. Perencanaan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

3.3. Analisis Kesalahan Ejaan dalam Berita Pembangunan Ekonomi

Selain membahas aspek perencanaan pembangunan ekonomi, penelitian ini juga menganalisis kesalahan ejaan yang terdapat dalam berita media daring berdasarkan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Hasil analisis menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa bentuk kesalahan ejaan yang cukup umum dalam penulisan berita daring.

Analisis kesalahan ejaan dalam berita pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa aspek kebahasaan masih menjadi tantangan dalam praktik jurnalistik media daring. Meskipun substansi berita telah memuat informasi penting mengenai kebijakan dan program pembangunan, ketidaktepatan dalam penggunaan ejaan dapat mengurangi kualitas penyampaian pesan. Dalam konteks komunikasi publik, bahasa yang akurat dan sesuai kaidah memiliki peran sentral dalam menjaga kejelasan makna serta kredibilitas media.

Berdasarkan hasil analisis, kesalahan yang ditemukan umumnya berkaitan dengan penggunaan huruf kapital, penulisan kata depan, tanda baca, serta penulisan kata baku dan unsur serapan. Kesalahan penggunaan huruf kapital sering terjadi pada penulisan jabatan dan nama instansi. Dalam kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), huruf kapital digunakan pada nama jabatan apabila diikuti oleh nama orang atau digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, sedangkan jika tidak merujuk secara khusus, maka tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan ini menunjukkan kurangnya ketelitian dalam proses penyuntingan.

Selain itu, kesalahan penulisan kata depan seperti “di” dan “ke” yang digabung dengan kata yang mengikutinya juga masih sering ditemukan. Padahal, dalam EBI, kata depan “di” dan “ke” yang menunjukkan tempat harus

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kesalahan sederhana ini dapat memengaruhi profesionalitas tulisan dan menunjukkan kurang optimalnya proses penyuntingan naskah sebelum dipublikasikan.

Dari sisi tanda baca, penggunaan koma yang tidak tepat dalam kalimat majemuk dapat menyebabkan ambiguitas makna. Struktur kalimat berita yang panjang dan kompleks sering kali memerlukan ketelitian ekstra dalam penempatan tanda baca agar informasi tetap mudah dipahami pembaca. Ketidaktepatan tanda baca berpotensi menimbulkan salah tafsir, terutama dalam berita yang memuat data, angka, atau pernyataan resmi pemerintah.

Kesalahan penulisan kata baku dan unsur serapan juga menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman terhadap kosakata bahasa Indonesia yang telah dibakukan. Dalam konteks berita pembangunan ekonomi, banyak istilah teknis yang berasal dari bahasa asing. Apabila tidak disesuaikan dengan bentuk baku yang telah ditetapkan, hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penggunaan istilah dan mengurangi standar kebahasaan media.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa kualitas bahasa merupakan bagian integral dari kualitas informasi. Berita pembangunan ekonomi bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, media daring perlu memperkuat fungsi penyuntingan bahasa (copy editing) serta meningkatkan kompetensi kebahasaan jurnalis agar setiap informasi yang disampaikan tidak hanya akurat secara substansi, tetapi juga tepat secara linguistik. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah EBI menjadi salah satu indikator profesionalitas dan kredibilitas media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

3.4. Implikasi Kesalahan Ejaan terhadap Kualitas Informasi

Kesalahan ejaan dalam berita pembangunan ekonomi memiliki implikasi terhadap kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah EBI dapat mengurangi kredibilitas media serta menurunkan tingkat kepercayaan pembaca terhadap isi berita. Padahal, berita pembangunan ekonomi memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat secara akurat dan jelas.

Salah satu implikasi utama kesalahan ejaan adalah menurunnya tingkat keterbacaan (readability) teks. Berita yang memuat kesalahan penulisan kata depan, tanda baca, atau huruf kapital dapat mengganggu alur pemahaman pembaca. Struktur kalimat yang kurang tepat akibat kesalahan tanda baca, misalnya, dapat menyebabkan ambiguitas makna dan mengurangi efektivitas penyampaian informasi. Dalam berita pembangunan ekonomi yang sering memuat data, angka, dan istilah teknis, kejelasan bahasa menjadi sangat krusial agar informasi tidak disalahartikan.

Selain itu, kesalahan ejaan juga berdampak pada kredibilitas media. Media massa memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Ketika pembaca menemukan banyak kesalahan bahasa, persepsi terhadap profesionalitas media dapat menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap isi berita, termasuk terhadap informasi kebijakan dan program pembangunan yang disampaikan.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah pengaruhnya terhadap citra institusi atau pihak yang diberitakan. Berita pembangunan ekonomi umumnya memuat pernyataan pejabat pemerintah, kebijakan resmi, serta program strategis. Jika penyampaian informasi tersebut disertai kesalahan bahasa, maka pesan yang seharusnya mencerminkan keseriusan dan perencanaan yang matang dapat terkesan kurang profesional. Dengan demikian, kualitas bahasa turut memengaruhi bagaimana publik menilai kebijakan pembangunan.

Di sisi edukatif, media massa juga berperan sebagai contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi masyarakat. Berita daring yang banyak diakses oleh berbagai kalangan memiliki potensi besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa. Apabila kesalahan ejaan terus berulang tanpa perbaikan, hal tersebut dapat berkontribusi pada penyebaran penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah.

Oleh karena itu, implikasi kesalahan ejaan terhadap kualitas informasi menunjukkan pentingnya proses penyuntingan bahasa yang ketat sebelum publikasi. Media daring perlu memperkuat standar editorial, meningkatkan kompetensi kebahasaan jurnalis, serta memanfaatkan pedoman EBI secara konsisten. Dengan demikian, informasi pembangunan ekonomi yang disampaikan tidak hanya akurat secara substansi, tetapi juga berkualitas dari segi kebahasaan, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat secara optimal.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam berita media daring. Di

sisi lain, kualitas bahasa dalam penulisan berita juga perlu diperhatikan agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara efektif dan profesional.

3.5. Peran Media Daring dalam Membentuk Persepsi Publik terhadap Pembangunan Ekonomi

Media daring tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pembangunan ekonomi. Dalam perspektif komunikasi massa, media memiliki kekuatan framing, yaitu kemampuan untuk menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa sehingga memengaruhi cara audiens memaknai informasi tersebut. Dalam konteks pemberitaan pembangunan ekonomi, pemilihan judul, diksi, kutipan narasumber, serta penekanan pada data tertentu dapat membentuk citra positif atau kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar berita pembangunan ekonomi cenderung menggunakan narasi yang bersifat informatif dan optimistis. Fokus pemberitaan sering diarahkan pada capaian target, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Narasi semacam ini berpotensi membangun kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pembangunan. Namun, di sisi lain, pemberitaan yang kurang menghadirkan sudut pandang alternatif atau analisis kritis dapat membatasi ruang diskusi publik secara lebih komprehensif.

Media daring juga berperan dalam memperluas akses informasi pembangunan hingga ke masyarakat luas melalui platform digital yang mudah diakses. Kecepatan distribusi informasi memungkinkan masyarakat memperoleh pembaruan kebijakan secara real time. Akan tetapi, kecepatan tersebut harus diimbangi dengan akurasi dan verifikasi yang memadai agar tidak terjadi penyebaran informasi yang kurang tepat.

Dengan demikian, media daring memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kualitas framing, kedalaman analisis, serta ketepatan bahasa dalam pemberitaan pembangunan ekonomi sangat menentukan bagaimana publik memahami, menerima, dan merespons kebijakan pembangunan yang dijalankan.

3.6. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai proses penyusunan kebijakan, alokasi anggaran, serta target dan indikator kinerja yang ingin dicapai. Berdasarkan analisis berita, aspek transparansi sering kali disampaikan dalam bentuk publikasi rencana kerja pemerintah, laporan capaian pembangunan, serta pernyataan resmi pejabat terkait.

Namun demikian, tidak semua berita memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme perencanaan dan evaluasi kebijakan. Sebagian besar informasi lebih berfokus pada hasil akhir atau target pertumbuhan yang ingin dicapai. Padahal, keterbukaan mengenai proses perencanaan dan pengawasan anggaran sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah potensi penyimpangan.

Akuntabilitas juga menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berarti pertanggungjawaban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap dampak kebijakan yang diambil. Dalam hal ini, media memiliki peran sebagai pengawas sosial (social control) yang dapat mengkritisi pelaksanaan program pembangunan serta mengungkap permasalahan yang muncul di lapangan.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perencanaan pembangunan ekonomi yang transparan dan akuntabel. Transparansi yang baik akan memperkuat legitimasi kebijakan, sedangkan akuntabilitas yang konsisten akan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3.7. Tantangan Implementasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meskipun perencanaan pembangunan ekonomi telah dirancang secara sistematis, implementasinya di lapangan sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun kapasitas kelembagaan. Perbedaan kemampuan antarwilayah dalam mengelola program pembangunan dapat menyebabkan ketimpangan dalam hasil yang dicapai.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Ketidaksinkronan kebijakan, tumpang tindih program, atau kurangnya komunikasi antarinstansi dapat menghambat efektivitas pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam beberapa pemberitaan, kendala birokrasi dan lambatnya realisasi anggaran juga menjadi sorotan yang menunjukkan bahwa perencanaan yang baik perlu didukung oleh manajemen pelaksanaan yang efektif.

Tantangan lainnya adalah dinamika ekonomi global yang sulit diprediksi, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta krisis ekonomi global. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan berdampak pada pencapaian target pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ekonomi harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, keberhasilan perencanaan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kapasitas implementasi, koordinasi kelembagaan, serta kemampuan pemerintah dalam merespons tantangan eksternal secara cepat dan tepat.

3.8. Relevansi Peningkatan Kualitas Bahasa dalam Mendukung Efektivitas Informasi Pembangunan

Selain aspek substansi kebijakan, kualitas bahasa dalam pemberitaan pembangunan ekonomi memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung efektivitas komunikasi publik. Bahasa yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) akan memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan. Sebaliknya, kesalahan ejaan dan struktur kalimat yang kurang tepat dapat menghambat pemahaman serta mengurangi kredibilitas media.

Dalam konteks literasi publik, media daring memiliki tanggung jawab tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemberitaan pembangunan ekonomi yang sering memuat istilah teknis, data statistik, dan pernyataan resmi memerlukan ketelitian tinggi dalam penulisan agar tidak menimbulkan ambiguitas.

Peningkatan kualitas bahasa dapat dilakukan melalui penguatan fungsi penyuntingan (editing), pelatihan kebahasaan bagi jurnalis, serta penerapan pedoman EBI secara konsisten. Dengan adanya standar kebahasaan yang jelas, informasi pembangunan dapat tersampaikan secara lebih efektif dan profesional.

Secara keseluruhan, pembahasan pada bagian 3.5 hingga 3.8 memperlihatkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peran media dalam mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, efektivitas implementasi, serta kualitas bahasa dalam pemberitaan merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.9. Sintesis Temuan dan Relevansi terhadap Penguatan Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis pada subbab 3.1 hingga 3.8, dapat disintesis bahwa perencanaan pembangunan ekonomi, pemberitaan media daring, serta kualitas kebahasaan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam membentuk pemahaman dan persepsi publik terhadap pembangunan. Perencanaan pembangunan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis dalam mengatur arah kebijakan, tetapi juga sebagai dokumen strategis yang memuat visi, prioritas, serta indikator keberhasilan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi substansi, berita media daring cenderung merepresentasikan perencanaan pembangunan ekonomi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan, meningkatkan investasi, serta memperluas kesempatan kerja. Narasi yang ditampilkan umumnya bersifat informatif dan optimistis, dengan penekanan pada target dan capaian pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki peran dalam memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus membangun harapan publik terhadap keberhasilan pembangunan.

Namun demikian, analisis juga menunjukkan bahwa kedalaman informasi mengenai proses perencanaan, mekanisme evaluasi, serta partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Transparansi mengenai tahapan penyusunan rencana, dasar pengambilan keputusan, serta indikator pengukuran keberhasilan menjadi elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas kebijakan. Tanpa penjelasan yang memadai mengenai proses tersebut, pemberitaan pembangunan berpotensi hanya menampilkan aspek normatif tanpa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat.

Di sisi lain, kualitas bahasa dalam pemberitaan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas komunikasi pembangunan. Kesalahan ejaan, tanda baca, maupun penggunaan istilah yang tidak baku dapat mengurangi tingkat keterbacaan dan kredibilitas informasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang sering memuat data kuantitatif dan istilah teknis, ketepatan bahasa menjadi syarat utama agar pesan kebijakan tersampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

Sintesis temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya memerlukan perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten, tetapi juga komunikasi publik yang berkualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan disertai dengan strategi komunikasi yang transparan, mudah dipahami, dan berbasis data. Sementara itu, media daring perlu meningkatkan kedalaman

analisis serta menjaga standar kebahasaan agar mampu menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan kontrol sosial secara optimal.

Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh indikator makro seperti pertumbuhan dan investasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, partisipasi publik, serta efektivitas penyampaian informasi. Integrasi antara perencanaan yang terarah, implementasi yang akuntabel, dan komunikasi yang profesional menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan proses sistematis yang mencerminkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Dalam berita media daring yang dianalisis, perencanaan pembangunan ekonomi digambarkan sebagai upaya terstruktur pemerintah dalam merancang dan melaksanakan berbagai program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, peningkatan investasi, hilirisasi sektor produktif, serta penciptaan lapangan kerja. Perencanaan yang terarah, berbasis data, dan disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan daerah terbukti menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil pembangunan.

Dampak perencanaan pembangunan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat secara nyata melalui peningkatan kesempatan kerja, bertambahnya pendapatan masyarakat, serta membaiknya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Selain itu, perencanaan yang inklusif dan berbasis pemerataan berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang direncanakan secara matang tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Di sisi lain, hasil analisis juga menunjukkan bahwa media daring memiliki peran penting dalam merepresentasikan dan mengomunikasikan kebijakan pembangunan kepada publik. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk persepsi melalui proses framing dan pemilihan sudut pandang pemberitaan. Oleh karena itu, kualitas informasi yang disajikan sangat menentukan tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dijalankan.

Namun demikian, dari aspek kebahasaan masih ditemukan berbagai kesalahan ejaan dalam berita pembangunan ekonomi yang dianalisis. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan huruf kapital, penulisan kata depan, tanda baca, serta penulisan kata baku dan unsur serapan yang tidak sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Kesalahan ejaan ini berdampak pada menurunnya keterbacaan teks, berpotensi menimbulkan ambiguitas makna, serta dapat memengaruhi kredibilitas media sebagai penyampai informasi publik. Dalam konteks komunikasi pembangunan, ketepatan bahasa merupakan elemen penting agar pesan kebijakan dapat diterima dan dipahami secara tepat oleh masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas informasi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi berita, tetapi juga oleh ketepatan penggunaan bahasa dan kedalaman penyajian informasi. Perencanaan pembangunan ekonomi yang baik perlu didukung oleh implementasi yang konsisten, transparansi yang memadai, serta penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan sesuai kaidah bahasa. Integrasi antara perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang akuntabel, dan komunikasi yang profesional menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Referensi

1. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
2. Sukirno, S. (2016). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
3. Tarigan, R. (2014). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
4. Mulyana, D. (2018). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
5. Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

6. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7. Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
8. Nasution, Z. (2017). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
9. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
11. Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
12. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
13. Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
14. Jhingan, M. L. (2012). *The Economics of Development and Planning* (40th ed.). New Delhi: Vrinda Publications.
15. Kuncoro, M. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
16. Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
17. McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
18. Chaer, A. (2015). *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
19. Keraf, G. (2007). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.